

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PROGRAM PEMEBERIAN BANTUAN KAPAL SERTA ALAT TANGKAP IKAN KEPADA NELAYAN DI DESA MUARA BADAK ILIR OLEH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Emyllia Wardha Fahiya, Badruddin Nasir

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil pelaksanaan program pemberian bantuan kapal serta alat tangkap ikan dan mengetahui kendala dalam pelaksanaan program bantuan. Adapun teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi kepada kelompok nelayan dan dinas kelautan dan perikanan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yang berfokus pada hasil pelaksanaan program bantuan kepada nelayan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program tersebut memberikan efektifitas hasil tangkap ikan sehingga tercapainya target dan tujuan yang diinginkan ialah meningkatnya produktivitas nelayan, kemudian program bantuan yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam bentuk barang seperti kapal dan alat tangkap ikan telah membantu tercapainya efisiensi kegiatan nelayan, dan dengan adanya program bantuan tersebut kecukupan nelayan dalam melaut tidak terdapat hambatan dikarenakan kapal dan alat tangkap ikan telah memadai. Dalam hal ini pemerataan masih terdapat beberapa nelayan yang tidak memiliki alat tangkap yang tidak layak pakai dan terdapat nelayan yang sama sekali belum merasakan bantuan tersebut, responsivitas nelayan setelah mendapatkan bantuan ini mereka mendukung penuh adanya program bantuan yang telah dilaksanakan oleh pihak Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam hal ketepatan waktu dan pelaksanaan program memberikan peningkatan pendapat nelayan yang telah menerima bantuan. Kendala program bantuan kepada nelayan bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah terbatasnya anggaran serta rendahnya sumber daya manusia yang ditunjukkan dari banyaknya nelayan yang tingkat pendidikan hanya sebatas lulusan SD.

Kata Kunci : Evaluasi Hasil, Program Bantuan Nelayan, Dinas Kelautan dan Perikanan

Pendahuluan

Pembangunan sector perikanan sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional memiliki tujuan antara lain untuk meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat nelayan. Nelayan merupakan suatu masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir dengan mata pencaharian utamanya adalah mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di perairan pesisir dan laut. Masyarakat nelayan mempunyai karakteristik tersendiri yang membedakan nelayan berasal dari masyarakat pada umumnya. Kehidupan di laut yang sangat berisiko menimbulkan perbedaan karakteristik nelayan dengan masyarakat pada umumnya. Karakteristik yang terbentuk dari kebiasaan di laut yang keras dengan resiko, terutama resiko yang berasal dari faktor alam berupa cuaca. Hal ini mengakibatkan tingkat produktivitas nilai produksi yang dijalankan sangat berfluktuasi dengan tingkat ketidakpastiaan hasil produksi yang cukup tinggi.

Dalam memajukan kehidupan masyarakat, nelayan memegang peran yang cukup penting. Khususnya pada pemenuhan sumberdaya perikanan oleh masyarakat sebagai upaya kesejahteraan nelayan. Namun faktanya tingkat kesejahteraan nelayan relative tertinggal jika dibandingkan dengan sector lainnya sebagai pelaku ekonomi pada masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa sector ini diperlukan adanya campur tangan *stakeholder* baik dalam bentuk bantuan fasilitas ekonomi maupun regulasi sehingga nelayan dapat melangsungkan kegiatan usaha secara berlanjut dan memberikan kesejahteraan bagi keluarga.

Di daerah pesisir, kehidupan hanya bergantung pada makanan laut dan masyarakat hidup dengan teknik tradisional. Selain alat tangkap yang masih tertinggal nelayan hanya dapat melaut di wilayah laut terbatas sepanjang pantai. Sesuai dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.12/men/2008 tentang Pemberian Bantuan Langsung Kepada Masyarakat di Bidang Kelautan dan Perikanan, mendorong lebih banyak pemberdayaan masyarakat di bidang kelautan dan perikanan. Sektor perikanan yang mengalami penurunan, perlu adanya pendampingan langsung di sector perikanan ini untuk memberikan pelayanan kelautan dan perikanan kepada masyarakat nelayan.

Desa-desanya yang terletak di wilayah pesisir, khususnya Desa Muara Badak Iir sebagian penduduknya berprofesi menjadi masyarakat nelayan. Mereka juga mempunyai kesempatan untuk berkembang, didukung oleh kebijakan pemerintahan dalam mengeluarkan dana. Dana pemerintah yang diberikan berasal dari anggaran belanja pendapatan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan dipergunakan untuk pengeluaran penyelenggaraan, pelaksanaan, pembangunan dan pemberdayaan nelayan.

Program bantuan ini memiliki dua jenis sub program yaitu nelayan tangkap dan nelayan budidaya. Program bantuan nelayan ini berasal dari dana anggaran Kabupaten yang kemudian disalurkan melalui dana desa masyarakat dengan harapan masyarakat desa dapat merasakan keuntungan serta membantu

masyarakat nelayan dengan bantuan ini. Program bantuan terhadap nelayan diharapkan dapat diberikan kepada para nelayan secara merata demi tercapainya tujuan keberhasilan program. Sebagai wujud evaluasi peningkatan kesejahteraan nelayan.

Program ini kemudian direalisasikan dengan pemberian alat tangkap atau bibit ikan yang pada umumnya dipergunakan di kelompok nelayan seperti perahu fiber, jarring, bibir rumput laut/bibit ikan, mesin kapal, dan lainnya. Pada beberapa tahun ini bantuan nelayan menimbulkan dampak baik dan buruk dalam pelaksanaannya, salah satunya ialah persoalan pada saat mengajukan proposal.

Kerangka Dasar Teori

Evaluasi Program

Evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambilan keputusan (Suharto, 2005). Kemudian Cronbach dan Stufflebeam mengatakan bahwa evaluasi program ialah sebuah upaya untuk memberikan informasi kepada pengambil keputusan dan menekankan bahwa meskipun evaluator memberikan informasi, evaluator bukanlah pembuat keputusan rencana (Cronbach, 1982).

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai evaluasi program dapat disimpulkan bahwa evaluasi program adalah proses penilaian suatu program yang dimaksud dengan proses penilaian yaitu tingkat pencapaian atau hasil dari program dalam melaksanakan tugas dan tujuannya.

Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Lester Stewart, evaluasi kebijakan dapat dibagi menjadi dua tugas yang tidak selaras, tugas pertama adalah menyeleksi konskuensi kebijakan dengan menggambarkan efeknya. Dan tugas kedua adalah mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan kebijakan terhadap kriteria atau kriteria yang telah ditentukan. Evaluasi kebijakan mengacu pada isu-isu informasi berupa pengukuran dan evaluasi tahap implementasi kebijakan dan hasil atau konsekuensi dari kebijakan tertentu atau upaya yang direncanakan untuk menentukan langkah apa yang dapat diambil di masa depan. (Winarno, 2013:229).

Evaluasi kebijakan publik adalah proses menilai sejauh mana suatu kebijakan publik dapat menghasilkan hasil, yaitu dengan membandingkan hasil yang diperoleh dengan menggunakan tujuan dan sasaran kebijakan publik yang terkena dampak. (Muhadjir, 1996). Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan atau proses dari kebijakan publik, yang berarti memberikan penilaian terhadap kebijakan pemerintah, baik berhasil atau gagal.

Model-Model Evaluasi Menurut William Dunn

Menurut William Dunn (1990:609), penilaian kebijakan memiliki dua aspek yang saling berkaitan, yaitu penggunaan aneka macam-macam metode untuk memantau hasil kebijakan publik serta program dan aplikasi serangkaian nilai untuk menentukan kegunaan hasil. Selanjutnya William membagi evaluasi kebijakan menjadi tiga berdasarkan waktu evaluasi yaitu, sebelum pelaksanaan,

pada waktu pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan. Penilaian disaat pelaksanaan umumnya disebut pula menjadi evaluasi proses, sementara evaluasi setelah kebijakan diimplementasikan, dianggap sebagai evaluasi konsekuensi (*output*) kebijakan atau evaluasi akibat dampak (*outcome*) kebijakan, atau disebut juga menjadi evaluasi sumatif.

Melakukan evaluasi dari sebuah program atau kebijakan yang menciptakan dasar penilaian keberhasilan dari sebuah dampak program atau kebijakan publik. Dari hasil evaluasi dampak tersebut menghasilkan beberapa dasar penilaian program atau kebijakan yaitu sebagai berikut :

1. Efektivitas
Efektivitas adalah sebuah patokan membandingkan antara proses yang dilakukan dengan tujuan serta sasaran yang dicapai. Suatu program bisa dikatakan efektif bila usaha dan tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang dibutuhkan.
2. Efisiensi
Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk membentuk tingkat efektifitas tertentu. Efisiensi yang artinya sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah hubungan antara efektifitas serta perjuangan.
3. Kecukupan
Kriteria ini lebih membicarakan kememadaian hasil kebijakan publik tersebut dalam mengatasi sebuah masalah, atau seberapa jauh pencapaian hasil dapat memecahkan masalah kebijakan.
4. Pemerataan
Kriteria ini menganalisis apakah bantuan telah didistribusikan secara merata kepada kelompok masyarakat dan kebijakan yang disepakati telah di laksanakan, khususnya kelompok-kelompok sasaran dan penerima manfaat.
5. Responsivitas
Fokus dari kriteria ini menilai kepuasan kelompok masyarakat khususnya pada kelompok sasaran, atas kebijakan tersebut. Apakah hasil bantuan dan kebijakan yang dicapai atau yang dilaksanakan telah memuaskan kelompok masyarakat.
6. Ketepatan
Hasil pelaksanaan yang ditinjau dari kesesuaian biaya menggunakan standar serta bentuk surat pertanggungjawaban yang sesuai menggunakan ketentuan yang ada.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti akan melakukan observasi serta wawancara pada orang yang dianggap paling mengetahui kondisi dan situasi dilapangan. Lokasi penelitian akan dilakukan di Desa Muara Badak Ilir dan Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder.

Hasil Penelitian

Analisis Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberian Bantuan Kapal Serta Alat Tangkap Ikan Kepada Nelayan Desa Muara Badak Ilir

1. Efektivitas

Berdasarkan efektivitasnya pada dampak positif serta negative setelah melakukan program bantuan nelayan dapat terlihat bahwa dampak positif terhadap pencapaian produktivitas hasil tangkapan, untuk pencapaian target, hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini dikarenakan terbatasnya peralatan seperti alat tangkap ikan dan kapal. Kemudian sulitnya mendapatkan bahan bakar untuk kapal menjadi suatu kesulitan juga bagi nelayan terlebih lagi karena faktor cuaca yang mana terhalangnya nelayan untuk melakukan kegiatan melaut. William Dunn mengatakan bahwa efektivitas berhubungan dengan alternatif kebijakan dalam mencapai hasil yang diharapkan atau dapat mencapai tujuan tertentu. Dikatakan bahwa kegiatan suatu program bantuan melalui kapal serta alat tangkap ikan kepada nelayan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan telah mencapai tujuan. Hal ini kemudian dibuktikan dengan adanya peningkatan produktivitas hasil tangkapan. Walaupun nelayan masih bergantung dengan kondisi cuaca ketika hendak melaut. Kelompok nelayan di Desa Muara Badak Ilir setidaknya harus memiliki 10-15 orang, namun dalam suatu kelompok nelayan masih ada jumlah anggota yang melebihi syarat yang telah ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.

2. Kecukupan

Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan solusi mengenai permasalahan ini, yaitu menggunakan cara menyampaikan bantuan berupa kapal dan alat tangkap ikan. Dengan adanya program bantuan tersebut diharapkan mampu meringankan beban nelayan agar nelayan mampu melaut dan tidak terkendala dengan kapal serta alat tangkap ikan.

3. Pemerataan

Kebijakan ini bermaksud untuk menyetarakan semua bantuan yang akan diberikan kepada kelompok - kelompok nelayan yang berada di Desa Muara Badak Ilir. Dapat diketahui ada beberapa orang nelayan yang belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai. ini dikarenakan terbatasnya jumlah anggota nelayan dalam satu kelompok yang telah ditentukan oleh dinas kelautan dan perikanan, karena hanya 10 nelayan saja yang dapat masuk di sebuah kelompok nelayan dalam satu proposal bantuan.

4. Responsivitas

Dalam teori William Dunn mengatakan bahwa responsivitas berkenaan sebagai respon pelaksanaan kebijakan terhadap tujuan kebijakan public. Dalam kelompok nelayan tanggapan yang diterima oleh kelompok nelayan setelah mendapatkan bantuan berupa kapal dan alat tangkap merasakan peningkatan dalam hasil produksi. Namun kelompok nelayan menginginkan perhatian yang lebih dari program tersebut ialah pemantauan dan pendampingan, sehingga

bantuan yang telah di terima pada kelompok nelayan dapat dimaksimalkan dan juga dapat di pergunakan dalam waktu yang lama.

- a) **Tanggapan Masyarakat Nelayan Setelah Menerima Bantuan Nelayan**
Program bantuan nelayan bisa dikatakan berhasil bila tanggapan dari masyarakat nelayan setelah menerima bantuan dari program ini, program ini akan menjadi sia-sia jika keinginan masyarakat nelayan tidak terpenuhi dengan kebijakan tersebut dan jika keinginan masyarakat nelayan terpenuhi bisa dikatakan program bantuan ini sangat berhasil. Ketika program ini berhasil para nelayan berharap program ini terus berjalan di Desa Muara Badak Ilir, serta adanya pemantauan dan pendampingan dari pihak dinas kelautan perikanan untuk terus meningkatkan SDM
- b) **Tanggapan Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Terhadap Pemberian Bantuan**
Tanggapan pihak dinas kelautan dan perikanan terhadap pemberian bantuan. Dalam program bantuan ini pihak dinas kelautan dan perikanan kabupaten kutai kartanegara telah menugaskan beberapa personel untuk pemantauan dan pendampingan pada masyarakat nelayan. Pemantauan dan pendampingan ini dilaksanakan satu hingga tiga kali agar dapat memaksimalkan kinerja masyarakat nelayan yang telah mendapatkan bantuan.

5. Ketepatan

Didasari oleh teori William Dunn mengatakan bahwa ‘ketepatan berkaitan dengan memberikan hasil dan manfaat kepada kelompok nelayan’. Dalam hal ini hasil penelitian tujuan program bantuan ini untuk membantu perekonomian nelayan serta memberdayakan kelompok nelayan, dan meningkatkan kesejahteraan kelompok nelayan dengan adanya program bantuan berupa kapal serta alat tangkap ikan, Program bantuan ini telah meningkatkan SDM di Desa Muara Badak Ilir dan juga meningkatkan semangat masyarakat nelayan untuk terus berkembang dan lebih baik lagi. Kemudian hasil wawancara dan observasi yang peneliti bisa sampaikan yakni dilihat dari kerja keras masyarakat nelayan setelah mendapatkan bantuan dan pendampingan dalam program ini.

Kendala Program Pemberdayaan Nelayan Melalui Pemberian Kapal serta Alat Tangkap Ikan

1. Anggaran

Dalam program bantuan ini diperlukan syarat untuk mendapatkan bantuan tersebut. Salah satunya syaratnya adalah memiliki kelompok nelayan dengan beranggota 10-15 orang. Setelah dibentuk kelompok nelayan dibimbing dengan pembuatan proposal dimana untuk mendapatkan program bantuan tersebut. Dengan demikian seperti yang terjadi, di dalam pemberian bantuan yang tidak secara merata, dikarenakan salah satu penyebabnya adalah keterbatasan anggaran. Tetapi hal ini bukanlah factor kesengajaan melainkan keterbatasan anggaran yang

dimiliki oleh dinas kelautan dan perikanan tetap berusaha agar pemberian bantuan tersebut dapat secara merata kepada nelayan yang membutuhkan.

2. Masih Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Salah satu kendala yang bisa menghambat keberlangsungan program bantuan ini adalah kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki dalam hal ini yang dimaksud merupakan pelaku nelayan. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia terutama nelayan yang disebabkan kurangnya pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki oleh nelayan. Oleh karena itu, dinas kelautan dan perikanan tetap membimbing dan pelatihan kepada nelayan tentang program bantuan ini sampai nelayan itu sendiri dapat meningkatkan kesejahteraan dan mandiri. Kendala selanjutnya bahwa mengubah pola pikir nelayan bukannya hal yang mudah, karena karakteristik nelayan sendiri yang memang berbeda yang tidak untuk membentuk kehidupan yang lebih baik, masyarakat cenderung malas serta hanyalah kurang partisipasi sesama nelayan, seperti halnya yang terjadi dalam program bantuan ini, sebagian nelayan masih belum mau untuk berkontribusi di kelompok-kelompok pengelola lainnya, serta nelayan di program bantuan relative lebih efektif dan dipergunakan semaksimal mungkin.

Nama Penerima Hibah	Kelompok	Jenis Barang	Jumlah Barang	
KUB Sumber Laut		Alat Tangkap Purse Seine	1	Unit
		Kapal Penangkap Ikan >5 GT	1	Unit
		Mesin Utama	1	Unit
		Mesin Tambahan	1	Unit
		Mesin Winch	1	Unit
		Rumpon	2	Unit
KUB Kapitan Muda		Mesin Ketinting	22	Unit
KUB Nahkoda Jaya		Mesin Ketinting	23	Unit
Kelompok Usaha Bersama harapan Mutiara		Rehabilitas Pint Tambak	3	Unit

Tabel : Penetapan penerima Kelompok Hibah Dari Pemerintah Melalui Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2020

No	Sasaran		Bantuan	
	Kelurahan/Desa	Sasaran Bantuan		
1	Desa Muara Badak Ilir	POKDAKAN Salok Sumbada Sejahtera	1	Paket kebun bibit rumput laut euchcotonni
2	Desa Muara Badak Ilir	Salok Sumbala	1	Paket Bibit Rumput Laut

3	Desa Muara Badak Iilir	Badak Seaweed Mandiri	85810	Kg bibit rumput laut
4	Desa Muara Badak Iilir	KN. Pakamasse	8	Unit mesin kapal
5	Desa Muara Badak Iilir	KN. Rizky	18	Unit mesin ketinting
6	Desa Muara Badak Iilir	KN Gerbang Samudra	6	Unit Perahu

Tabel : Desa Muara Badak Iilir Penerima Bantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2019

Kesimpulan

Dari pemaparan data di atas yang telah dikumpulkan, peneliti dapat menyimpulkan tentang Evaluasi Hasil Pelaksanaan program Pemberian Bantuan Kapal serta Alat Tangkap Ikan Kepada Nelayan di Desa Muara Badak Iilir oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara, telah menjalankan program bantuan namun hasil yang diperoleh belum optimal. Dikarenakan banyak kekurangan dan kendala yang dialami dinas kelautan dan perikanan saat menjalankan program bantuan tersebut, hal ini diantaranya :

1. Pelaksanaan program bantuan nelayan melalui pemberian kapal serta alat tangkap ikan dilakukan beberapa langkah antara lain dengan pemberian bantuan tersebut berdasarkan jumlah nelayan.
2. Dalam pelaksanaan program bantuan berupa kapal serta alat tangkap ikan, para nelayan harus memiliki kelompok nelayan dan jumlah anggota sebanyak 10-15 anggota serta syarat-syarat lainnya yang ditentukan oleh dinas kelautan dan perikanan.
3. Dalam program bantuan kapal serta alat tangkap ikan ada juga program bantuan berupa hibah. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Lembaga Serta Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara khusus telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak harus serta tidak mengikat, dan tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
4. Kendala program bantuan merupakan keterbatasan anggaran (modal) dimana anggaran dinas kelautan dan perikanan terbatas sebagai akibatnya tidak seluruh nelayan bisa mencukupi kapal yang diberikan serta berkualitas sumber daya manusia yang masih rendah, hal ini ditunjukkan masih banyak masyarakat pesisir yang jarang lulus Sekolah Menengah Pertama (SD).

Saran

Dari kesimpulan di atas, peneliti ingin menyarankan beberapa hal untuk pengembangan program bantuan oleh dinas kelautan dan perikanan di masa yang akan datang, seperti :

1. Memberikan pengawasan serta pelatihan yang lebih intensif agar bantuan yang diberikan jelas membuat hasil pada nelayan.
2. Pembinaan yang dilakukan terhadap nelayan khususnya kelompok nelayan harus lebih banyak ditujukan pada peningkatan kemampuan serta keterampilan masyarakat, seperti pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mandiri.
3. Seharusnya dinas kelautan dan perikanan membuat kebijakan terkait penambahan jumlah kuota nelayan yang akan mendapatkan bantuan, begitu pula dengan pengawasan terhadap bantuan tersebut, supaya bantuan bisa dikelola dengan baik serta dipergunakan pada jangka waktu lama (panjang)
4. Dinas kelautan dan perikanan lebih meningkatkan anggaran terhadap anggaran program bantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar kebijakan publik (Edisi Revisi)*. Bandung: ALFABETA,Cv.
- Arikunto, S. Jabar. C. (2010). *Evaluasi program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Danuri Ginting, *Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hal 76
- Dunn, William N.2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Farida Yusuf Tayub Nafis. 2000. *Evaluasi Program*. Rineka Cipta. Jakarta
- Kusnadi,2002. *Konflik Sosial Nelayan*, Lkis: Yogyakarta.
- Nazir, Moh. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nugroho, Riant, *Public Policy: Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan*, Jakarta:Erlangga,2002
- Satori, Djam'an Aan Komariah, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA, Cv
- Suharsimi Arikunto, Abdul Jabar, *Evaluasi Program Pendidikan* (Jakarta:Bumi Aksara, 2014)
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika Aditama.
- Sumarmo Nugroho. *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*, (Yogyakarta: PT. Hanindita, 1987), hal 28
- Widodo, Joko. 2007. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno,Budi.2014. *Kebijakan Publik Teori, Prses dan Studi Kasus*. Jakarta: PT. Buku Seru.

Sumber Dokumen

Dokumen Profil Desa Muara Badak Ilir Tahun 2020

Laporan Bantuan Yang Tersalurkan Ke Masyarakat Tahun 2019
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1
ayat (1)

Sumber Internet

Dinas Perikanan dan Kelautan Kutai Kartanegara.

<https://prokom.kukarkab.go.id/>. (diakses 7 Agustus 2020)

<https://fajar.co.id/2020/04/09/daeng-rapi-tak-menyangka-soal-ketua-kpk-merinding-saya-pak/> (diakses 13 April 2022)
